



|                                                                                                                                                        |  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| Vol. 1. No. 2 (2020) 07-12                                                                                                                             |  | E-ISSN: XXXX-XXXX<br>P-ISSN: XXXX-XXXX |
| published online on the journal's website: <a href="http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin">http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin</a> |  |                                        |

### **Efektivitas Peran Bumdes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu**

**Jajang Abdul Nurhasan<sup>1</sup>, Asep Hamdan Munawar<sup>2</sup>,**

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia

<sup>1</sup>[jajangnurhasan@gmail.com](mailto:jajangnurhasan@gmail.com)

#### **Abstrak**

*Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, tingkat partisipasi masyarakat, dan peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan deskriptif jenis kualitatif-kuantitatif (mix methodes) yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk fenomena sosial dan data statistik. Data sampel menggunakan purposive sampling. Alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dilakukan melalui unit usaha masyarakat, seperti pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. BUMDes mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pendapatan masyarakat BUMDes yang paling banyak adalah berumur 41-50 tahun (36%), berumur 51-60 tahun (30%), berumur 31-40 tahun (18%), berumur 20-30 tahun (12%) dan yang paling sedikit adalah yang berumur 61-70 tahun (4%). Ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan adanya BUMDes masih berusia produktif. BUMDes yang paling banyak adalah yang berpendidikan SMA (56%), berpendidikan SD (20%), berpendidikan SMP (16%) dan yang paling sedikit adalah yang tamatan Sarjana (8%).*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Bumdes, Masyarakat, Desa

#### **Abstract**

*The problems taken in this research are the process of community economic development through BUMDes in Panjalu Village, Panjalu District, Ciamis Regency, the level of community participation, and the role of BUMDes in increasing people's income. This research is a descriptive field research of qualitative-quantitative type (mix methodes) that describes several data findings formulated in the form of social phenomena and statistical data. Sample data using purposive sampling. The tools used by authors to collect data are the result of documentation, observation, and interviews. The results of this study show that in the process of managing BUMDes are carried out through community business units, such as market management, management of household productive business units and other service units. Some of these units open up opportunities for people to get new jobs. BUMDes are able to be an effective strategy in mobilizing the potential owned by the village with the aim of increasing the income of the villagers. The most income of BUMDes are 41-50 years old (36%), 51-60 years old (30%), 31-40 years old (18%), 20-30 years old (12%) and the fewest are those aged 61-70 years (4%). This indicates that respondents who work with BUMDes are still of productive age. Bumdes are the most high school educated (56%), elementary school educated (20%), junior high school educated (16%) and the fewest are undergraduates (8%).*

**Keywords:** Efektivitas, Bumdes, Community, Village

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>2</sup> Pembangunan nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian negara. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Menurut Sumpeno, strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.<sup>3</sup> Beberapa strategi yang secara umum diimplementasikan dalam membangun kemandirian desa antara lain: (1) membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis, (2) memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) membangun sistem perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan partisipatif, dan (4) membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.<sup>4</sup> Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan

---

<sup>1</sup> Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal Januari 2017, terdapat di [https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/3\\_4/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa1485440604](https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/3_4/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa1485440604), diakses pada tanggal Juni 2018

<sup>2</sup> H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

<sup>3</sup> Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Aceh: The World Bank, 2011), hlm. 8

<sup>4</sup> Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 27

masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Pengaturan desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional. Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalah mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan. Diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal, dan (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).<sup>5</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebelumnya

---

<sup>5</sup> Kementrian Negara, "Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal" terdapat di <http://www.kemenegpdt.go.id>, diakses pada tanggal 12 Juni 2018

telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom-up planning*) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.<sup>6</sup>

Adapun tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*) dan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*). Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*) adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*) adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah.<sup>7</sup> Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah desa Panjalu yang berada di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Desa Panjalu merupakan Desa yang menjadi percontohan Desa untuk seluruh Desa yang berada di kecamatan Panjalu. Keberhasilan pengelolaan BUMDes dalam pengelolaan potensi Desa menjadikan Desa Panjalu sebagai desa teladan. Desa Panjalu merupakan daerah agrowisata yang mampu menjadi bagian penting dari usaha kecamatan Panjalu untuk meraih kemajuan.

Dalam kasus ini, pendirian BUMDes Desa Panjalu termasuk ke dalam perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom-Up Planning*), hal ini karena BUMDes Desa Panjalu tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari salah satu warga desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa yang sebelumnya sudah ada agar dijadikan satu dalam sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait

---

<sup>6</sup> Reza M. Zulkarnaen *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*, penelitian tahun 2017, terdapat di [digilib.Unpad.ac.id/11430-22005-1-SM](http://digilib.Unpad.ac.id/11430-22005-1-SM), diakses tanggal 12 Juni 2018

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4

perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78.

Berdasarkan keunikan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang efektivitas pengembangan BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes serta menggali seberapa besar partisipasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul, *Efektifitas Peran BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu*.

## METODE

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.<sup>8</sup> Secara terminologis, penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta diukur secara statistika. Salah satu ciri utama penelitian campuran (*mixes*) adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya.<sup>9</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membuat dekripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>10</sup> Menurut Irawan Suehartono, penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.<sup>11</sup> Penelitian deskriptif ini ditunjang oleh teknik pengumpulan data antara lain survey literatur dan pengalaman. Survei *literature* dilakukan untuk memperoleh sumber data primer yakni dari buku teks dan data sekunder antara lain dari artikel jurnal, media cetak dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### 1. Pengelolaan BUMDes dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat

BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa BUMDes wajib ada di setiap desa, seperti dalam peraturan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Maka berdasarkan UU

---

<sup>8</sup> Noor Juliansyah dan Ahmadi, *Metode Penelitian: Penelitian, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 34

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 214

<sup>11</sup> Irawan Suehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 35

tersebut, berdirinya BUMDes Panjalu dibentuk sejak tahun 2015 mampu menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

Meskipun BUMDes terpisah dari struktur formal pemerintahan desa, BUMDes tidak berdiri secara Eksklusif. Kebijakan pendirian BUMDes harus melalui peraturan desa, yang disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Karena itu dalam konteks ini, BPD berwenang melakukan pengawasan umum terhadap BUMDes untuk menjaga agar BUMDes berjalan secara bertanggung jawab. Bapak Zikri selaku Ketua BUMDes juga menerangkan bahwa kelembagaan BUMDes bersifat unik. BUMDes bukan sebagai usaha murni pemerintah, bukan usaha bersama masyarakat, bukan usaha swasta, dan bukan pula sebagai bentuk *public and private Partnership*. Bapak Zikri juga menambahkan bahwa prinsip dasarnya BUMDes bukanlah proyek pemerintah di desa tetapi sebagai bentuk prakarsa dan gerakan desa. Berdirinya BUMDes di desa Panjalu sangat membantu pendapatan desa, karena lewat BUMDes, pengelolaan potensi desa dapat termobilisasi dengan baik. Seperti adanya potensi air terjun yang bisa dikembangkan sebagai usaha BUMDes dalam meningkatkan usaha masyarakat. Pendanaan desa dengan BUMDes itu terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDes berdiri sendiri, namun masih dalam naungan pemerintah desa. Terbentuknya BUMDes diharapkan sebagai upaya menjadikan desa Panjalu sebagai desa mandiri secara *financial*, sehingga dapat membantu permodalan usaha masyarakat.

Secara pengelolaan, BUMDes berdiri sendiri, namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam dana desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMDes menjadi sebagai wadah badan usaha yang menaungi usaha kecil masyarakat agar lebih optimal pemasarannya. Hal tersebut juga di tegaskan kembali oleh Bapak Apip Irgan selaku Ketua BUMDes, : Desa Panjalu memiliki usaha toko sembako yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Kami menerima dan menampung produk dari masyarakat seperti kripik tempe, pisang dan sebagainya yang kemudian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Melalui unit usaha ini membantu masyarakat menyalurkan produk usaha masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga khususnya.<sup>12</sup>

BUMDes Desa Panjalu dalam pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat. Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes yang memberikan masukan terbesar dalam keuangan desa diantaranya:

a. Pengelolaan Sampah

Desa Panjalu merupakan desa yang terbilang cukup maju di antara desa di Kecamatan Panjalu. Adanya pasar tradisional menjadikan pusat kegiatan ekonomi masyarakat maju. Dengan adanya pasar, maka unit usaha yang memberi kontribusi besar berada dipasar. Pasar Wisata Panjalu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa Panjalu. Unit usaha pengelolaan BUMDes yang ditujukan untuk wilayah pasar memberi kontribusi terbesar terhadap pemasukan anggaran desa. Dimana pengelolaan sampah ini setiap harinya memberi masukan sebesar 300 ribu setiap harinya. Seperti yang diungkapkan Mimin Hermin Bendahara BUMDes adanya unit usaha pengelolaan

---

<sup>12</sup> Herman, Wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2018

sampah bukan hanya memberi kemudahan membuang sampah, namun juga memberi pekerjaan baru kepada masyarakat. Uang pengelolaan sampah itu masuk ke dalam dana desa.

b. Pengelolaan Tempat Parkir

Unit usaha kedua yang masih berasal dari pasar adalah pengelolaan parkir. Berdasarkan observasi, pengelolaan parkir yang baik menjadikan kondisi pasar tertib dan aman. Dari parkir setiap harinya hampir 500 ribu. Seperti yang diungkapkan seperti yang diungkapkan Bapak Hajuli<sup>13</sup> bahwa: Unit usaha pengelolaan pasar baik parkir maupun sampah ini, memang sangat member masukan terbesar kepada desa. Oleh sebab itu, pengelolaan unit usaha pasar harus dilakukan secara baik agar tetap berlanjut, sehingga membantu keuangan desa yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya pengelolaan parkir yang baik, kegiatan pasar terkendali. Masyarakat aman dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Lewat parkir, remaja yang tidak memiliki pekerjaan, mendapat masukan tambahan untuk keluarganya. Hampir 80% pendapatan desa itu berasal dari pasar. Hendra<sup>14</sup> juga mengatakan bahwa dengan ia menjaga Parkir setiap seminggu 2 kali membantu keuangannya untuk keperluan sekolah. Melalui parkir ini juga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Unit Produk dan Jasa

Unit usaha produk dan jasa yang di dirikan oleh BUMDes dibagi menjadi dua yaitu simpanan dan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk simpanan yang ada yaitu tabungan masyarakat Panjalu dan tabungan usaha mikro. Tabungan ini diadakan dengan tujuan untuk memberi dukungan kepada masyarakat dalam meningkatkan usahanya agar tidak kehabisan modal, serta membantu masyarakat untuk menabung untuk kebutuhan mendatang, seperti kebutuhan sekolah. Kedua bentuk tabungan tersebut dikelola oleh BUMDes dengan cara memutar kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya tabungan membantu masyarakat tidak kesulitan mendapatkan modal.

Hal diatas juga ditegaskan oleh Ibu Anggun bahwa: Melalui simpanan tersebut, saya tidak kesulitan mencari modal lagi dan karena selain bisa menambah modal, saya juga bisa menabung. Sehingga usahanya bisa di control dengan baik pemasukannya. Dengan masyarakat menabung, masyarakat disini yang punya usaha jug terbantu dengan meminjam modal dari tabungan tersebut, yang memang sudah disepakati bersama.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil interview dan observasi juga, masyarakat banyak tertarik dengan unit produk dan jasa simpan pinjam in. selain membantu masyarakat untuk menabung, jug membantu masyarakat yang memiliki tekad memulai usaha.

d. Unit Usaha Sektor Riil

Bentuk usaha sektor riil yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Panjalu adalah pengadaan kebutuhan masyarakat sehari-hari yaitu sembako. Toko sembako ini di buka di kantor kelurahan. Toko sembako ini juga merupakan tempat penitipan produk masyarakat seperti keripik, kerajinan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Hajuri salah satu Staf Desa Panjalu pada tanggal 22 Juni 2018

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra salah satu Petugas Parkir Desa Panjalu pada tanggal 22 Juni 2018

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Anggun salah satu nasabah yang aktif menabung di Desa Panjalu pada tanggal 22 Juni 2018

dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi, toko sembako ini sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Banyak masyarakat juga yang belanja di toko sembako BUMDes.<sup>16</sup>

Selain toko sembako, unit usaha sektorial riil BUMDes lainnya yaitu pengadaan barang dan jasa seperti loket pembayaran listrik, air, telepon, jasa konstruksi dan lainnya.

Karyawan yang menjaga loket pemuda yang tidak sekolah lagi, sehingga membantu membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dengan adanya pengadaan barang dan jasa tersebut, masyarakat semakin mudah dan tidak ribet harus keluar desa. Malahan dengan adanya pengadaan barang dan jasa tersebut, banyak masyarakat dari luar desa Panjalu yang datang ke loket desa Panjalu tersebut.

e. Industri Rumah Tangga

Berdasarkan hasil observasi, ibu-ibu masyarakat desa Panjalu selain hanya sebagai ibu rumah tangga, mereka juga memiliki pekerjaan sampingan seperti bekerja di pasar, membuka usaha kelontongan, ada beberapa kelompok masyarakat memiliki usaha produktif rumah tangga yang sampai sekarang masih berjalan dan berkembang. Usaha industri rumah tangga ini mampu menambah pendapatan, membuat masyarakat mandiri, juga menjadi khas atau oleh-oleh desa Panjalu.<sup>17</sup>

Bapak R. Yadi Hermayadi, selaku Pelaksana Operasional unit usaha rumah tangga BUMDes Desa Panjalu menerangkan bahwa unit usaha rumah tangga yang dikelola oleh BUMDes merupakan usaha membantu masyarakat untuk memasarkan produk masyarakat agar bisa terjual. Unit usaha rumah tangga ini juga bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) desa Panjalu yang kegiatannya memberdayakan ibu rumah tangga.

Ibu Herlina salah satu pengurus KWT menerangkan: Manfaat adanya BUMDes membantu memasarkan produk yang kita miliki, selama ini produk kita hanya bisa dinikmati oleh anggota KWT saja, tapi setelah adanya BUMDes, produk kami diproduksi lebih banyak, dan itu bisa membantu meningkatkan pendapatan ibu-ibu disini yang tergabung dengan KWT.<sup>20</sup>

## 2. Kegiatan Usaha BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Usaha-usaha dalam pendapatan ekonomi masyarakat desa Panjalu melalui BUMDes dilakukan melalui beragam kegiatan adalah sebuah upaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan-pelatihan dilakukan sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa Panjalu yang mandiri, kreatif, kompotitif, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Usaha peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Beberapa usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program BUMDes desa Panjalu, yaitu :

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes desa Panjalu adalah untuk memberikan informasi mengenai berdirinya BUMDes. Kegiatan penyuluhan ini juga

---

<sup>16</sup> Observasi lapangan yang dilakukan penulis pada tanggal 25 Juni 2018

<sup>17</sup> Observasi lapangan yang dilakukan penulis pada tanggal 25 Juni 2018 <sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Herlina salah satu Penggerak Kelompok Wanita Tani Desa Panjalu pada tanggal 22 Juni 2018

dilakukan dalam bentuk sosialisasi unit usaha yang akan dikembangkan di desa Panjalu kepada masyarakat, agar masyarakat ikut serta merealisasikan unit usaha tersebut. Bapak Dzikrif<sup>18</sup> mengatakan bahwa penyuluhan ini dilakukan agar unit usaha yang dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat yang bisa membantu mengembangkan ekonomi masyarakat.

b. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusi masyarakat desa Panjalu. Melalui pelatihan kemampuan secara *hard skill* dan *soft skill* masyarakat akan terlatih, sehingga menjadikan masyarakat yang terampil, mandiri, dan kreatif. Dalam hal ini, kegiatan pelatihan seperti pelatihan pembuatan kerajinan, pelatihan tataboga dan sebagainya dilakukan dengan cara bekerjasama dengan organisasi masyarakat seperti Kelompok Wanita Tani, SKH, dan Watala.

Dengan adanya pelatihan mampu meningkatkan keterampilan ibu-ibu rumah tangga untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan dengan cara membuka usaha dari hasil kegiatan pelatihan tersebut. Berdasarkan data kegiatan Desa, pelatihan kewirausahaan dilakukan pada bulan Februari 2016. Sampai pada akhir tahun 2016 kegiatan ini sudah 3 kali dilakukan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 24 orang secara umum. Pelatihan dibimbing dan dibina oleh pelatih dari lokal maupun dari luar kota yang sudah bekerjasama dengan pihak Watala, Kawan Tani, KWT, dan lainnya.

Awal kegiatan ini adalah dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan kewirausahaan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya masyarakat diberikan pelatihan pengembangan skil masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti dengan menghasilkan produk kerajinan, keripik-keripik dan sebagainya. Tahap terakhir kegiatan ini adalah memberikan edukasi masyarakat mengenai pemasaran produk yang baik. Kegiatan ini lebih mengoptimalkan praktik masyarakat sehingga masyarakat mudah mengaplikasikannya untuk dapat di jadikan pengembangan usaha masyarakat setempat.

c. Peminjaman Modal

Cara pengembangan usaha dan pengelolaan dana pinjaman untuk masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes adalah dana desa yang merupakan hasil dana terkumpul dari setiap unit usaha yang dibuka oleh BUMDes. Masyarakat diberi pinjaman sesuai dengan bentuk usaha yang dimilikinya, kemudian ada juga modal dari BUMDes, produk masyarakat yang buat, maka hasilnya dibagi dua.

**3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi melalui BUMDes Desa Panjalu**

Indikator keberhasilan BUMDes Desa Panjalu dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang dimulai sejak tahun 2015 adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah aktor utama dalam meningkatkan menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian desa. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui

BUMDes meliputi :

---

<sup>18</sup> Wawancara Bapak Dzikri salah satu Panitia Penyelenggara Penyuluhan Desa Panjalu pada tanggal 22 Juni 2018

## 1. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dimulai pada tahap keikutsertaan masyarakat dalam membentuk BUMDes sebagai badan otonom desa yang memiliki wewenang memobilisasi kegiatan usaha masyarakat. Partisipasi masyarakat selanjutnya dalam perencanaan adalah kehadiran masyarakat dalam sosialisasi dan perencanaan kegiatan BUMDes. Berdasarkan hasil observasi 18 Juli 2018, masyarakat mendukung dan merespon dengan baik berdirinya BUMDes. Seperti yang dikatakan Bapak Paijo<sup>19</sup>, menurutnya dalam proses pendirian dan perencanaan kegiatan BUMDes masyarakat dilibatkan untuk ikut serta dalam rapat pembentukan yang dilakukan di balai Desa. Dalam sosialisasi untuk perencanaan unit usaha yang akan dikelola BUMDes masyarakat dilibatkan baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang memang mereka memiliki peran dalam kegiatan ekonomi.

Pernyataan Bapak Paijo itu juga diperjelas oleh Bapak Zikri bahwa BUMDes kan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, apabila masyarakatnya kurang peduli tidak akan terlaksana. Pada awal pembentukan masyarakat sangat antusias mendukung sekali, sampai sekarang jug sangat mendukung. Unit usaha yang sudah dikelola dengan baik oleh BUMDes itu juga merupakan hasil musyawarah bersama masyarakat, karena memang dengan adanya pasar kegiatan ekonomi masyarakat harus dikontrol dengan baik. Namun pada sisi lain, dari hasil observasi dan Interview, penulis menemukan perbedaan pendapat dari beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah Kadus D, dimana masyarakat kurang paham mengetahui keberadaan BUMDes Desa Panjalu. Bapak Suparno menjelaskan bahwa ia selaku Kepala Wilayah D kurang faham mengetahui BUMDes karena memang waktu sosialisasi dan perencanaan berdirinya BUMDes tidak mengetahui, dan ia mengetahui setelah terbentuk. Menurutnya itu dikarenakan kurang komunikasi Kepada Desa dengan masyarakat wialayah Dusun D, karena memang jauh dari wilayah pusat desa Panjalu.<sup>20</sup>

## 2. Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan dilakukan setelah dilakukannya perencanaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Seperti masyarakat menitipkan hasil produksinya kepada BUMDes itu sudah termasuk bentuk partisipasi membantu merealisasikan BUMDes. Hal itu ditunjang oleh pendapat salah seorang sekretaris Desa Bapak Agus, menurutnya pelaksanaan dilakukan setelah selesai perencanaan dan kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang diabntu oleh pengurus BUMDes.

Masyarakat ikut dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh BUMDes yang tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat. Menurutnyanya juga, setelah masyarakat bisa memiliki skil baik itu makanan, kerajinan, dan lainnya, bisa dititipkan kembali kepada BUMDes untuk dipasarkan agar dapat berkembang lebih baik.

---

<sup>19</sup> Wawancara Bapak Paijo salah satu Peserta yang hadir dalam rapat desa Panjalu pada tanggal 28 Juni 2018

<sup>20</sup> Wawancara Bapak Suparno Kepala Wilayah/Kepala Dusun D Desa Panjalu pada tanggal 30 Juni 2018

Sementara Ibu Anggun menegaskan bahwa pengelolaan unit usaha rumah tangga baru dilakukan oleh 1-3 orang saja, sehingga jenis produk yang dimiliki BUMDes baru sedikit jenisnya. Ia mengharapkan masyarakat dapat percaya kepada BUMDes untuk mengembangkan usaha mereka demi manfaat bersama.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dibutuhkan dalam kegiatan BUMDes agar semua unit usaha yang dibentuk BUMDes berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya merupakan tugas dan kewajiban pengurus dan anggota BUMDes serta pemerintah desa setempat. Kalau tidak ada kegiatan ini, unit usaha yang di didirikan akan berhenti dan bisa merugikan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga, peran masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting. Tahap ini masyarakat ikut dilibatkan guna mengawasi berjalannya setiap unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rahman bahwa masyarakat memang benar harus dilibatkan dalam mengawasi segala kegiatan desa. Apalagi saat ini, dana desa begitu besar, apabila masyarakat tidak mengawasi dengan baik, takutnya ada penyimpangan yang dilakukan aparat desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi adalah melaporkan setiap gerak pengurus BUMDes dan aparat desa yang kurang baik misalnya, ikut dalam rapat desa, mengamati perkembangan pembangunan desa dan sebagainya. Namun sayangnya hal demikian masyarakat masih kurang peduli, sehingga masyarakat kalau ada kesalahan di desa hanya bisa berbicara di luar.<sup>21</sup>

## SIMPULAN

BUMDes mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Pengelolaan BUMDes Desa Panjalu dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk pada kas desa yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan suatu program baik yang dirancang oleh desa ataupun pusat. Masyarakat adalah subjek dan objek dari kegiatan, karena itu partisipasi sangat dibutuhkan program sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes Desa Panjalu masih sangat minim baik secara perencanaan, pelaksanaan sampai pada *monitoring* dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Achmadi, Cholid Narbuko. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

---

<sup>21</sup> Wawancara Bapak Rahman anggota BPD  
Desa Panjalu pada tanggal 30 Juni 2018

- Ahmadi, Noor Juliansyah. 2013. *Metode Penelitian: Penelitian, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarto, Atik. 2002. *Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Edi Sueharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung PT. Rekan Aditama.
- Eko, Sutoro dkk. 2015. *Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. Jakarta: t.p.
- Faisal, Henry. 2010. *Ekonomi Media*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Farida, Ai Siti. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: t.p.
- Hasibuan, Malayu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grafika.
- Hayat. 2013. *Realokasi Kebijakan Fiskal; Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013.
- Isgiyanto, Awal. 2009. *Teknik Pengambilan Sampel pada Penelitian Non Ekserimental*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Istiqamah, Supriyati. 2008. *Dasardasar Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandar Lampung: Fakultas Dakwah
- Jauvani Sagala, Ella. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jhingan. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, A.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa
- Poerwoko Soebianto, Totok Mardikanto. 2012.
- Wahab, Wirdayani. 2016. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah*.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana